



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INA SOELISTYANI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 268408

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/80 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m²/45 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m²/50 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 479.500.000

1. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, TOYOTA JEEP HARTOP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOBIL, MITSUBISI PAJERO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.859.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 152.536.185



F. HARTA LAINNYA	Rp.	3.100.000
Sub Total	Rp.	2.911.995.185
III. HUTANG	Rp.	274.234.692
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.637.760.493

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.